

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA LIMBUNG KABUPATEN
LINGGA**

**Oleh
Yunita
NIM. 150574201055**

Abstrak

Tindak Pidana Penadahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karenanya perbuatan itu dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 480 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hukum tindak pidana penimbunan roda dua dan mengidentifikasi pengemudi serta hambatan penegakan hukum tindak pidana penimbunan roda dua di Desa Limbung Kabupaten Lingga. Adapun Metode yang penulis pakai adalah metode penelitian hukum Yuridis Empris yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di Desa Limbung Kabupaten Lingga. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari Polsek Daik Lingga, Penjual dan Pembeli kendaraan bermotor dari hasil curian yang di duga sebagai barang tadahan. Data sekunder yang berupa berupa Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Daik Lingga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang tindak pidana penadahan, kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum tentang penjual dan pembeli dari kendaraan bermotor yang di duga hasil curian, dan juga faktor ekonomi sebagai pendorong terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang di duga hasil curian karena dinilai sangat menguntungkan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana , Penadahan.

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF COLLECTING TWO-WHEELED MOTORIZED VEHICLES IN LIMBUNG VILLAGE LINGGA DISTRICT

By
Yunita
NIM. 150574201055

Abstract

The crime of redemption is an act that is against the law which results in a criminal act as stipulated in Article 480 of the Criminal Code, regarding collection. The purpose of this study is to find out law enforcement against criminal acts of collecting two-wheeled motorized vehicles and also to find out the obstacles in law enforcement against criminal acts of collecting two-wheeled motorized vehicles in Limbung Village, Lingga Regency. The method used by the author is the Juridical Empirical legal research method which is carried out by conducting legal identification and analyzing law enforcement against criminal acts of collecting two-wheeled motorized vehicles in Limbung Village, Lingga Regency. The source of the data comes from primary data obtained through interviews with parties from the Daik Lingga Police, sellers and buyers of stolen motorized vehicles which are suspected of being stored goods. Secondary data in the form of Article 480 of the Criminal Code concerning Collection. The results of this study indicate that the number of cases of criminal acts of collecting two-wheeled motorized vehicles in the jurisdiction of the Daik Lingga Police is due to a lack of public knowledge of the existence of laws governing criminal acts of collection, lack of supervision by law enforcement officials regarding the sale and purchase of motorized vehicles which are allegedly the result of stolen, and also economic factors as a driving force for buying and selling of vehicles which are suspected of being stolen because they are considered very profitable.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Retention.